

## ANALISIS RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DI KABUPATEN BANDUNG

Riah Maryani

STIE Indonesia Membangun

nenk0095@yahoo.com

**Abstract:** This research was conducted with the aim to know how the process of parking levy management in Bandung regency, what are the obstacles experienced in the management so far, and the process of revenue into local revenue (PAD) which is beneficial to the development of facilities and infrastructure in Bandung regency. The research method used is descriptive verifikatif and the type of data used is secondary. Analysis of research data is done by using the method of Multiple Linear Regression and Path Analysis (Path Analysis). The statistical test in this study used F-Test, T-Test and Classic Assumption Test. The result of regression analysis shows that  $R^2$  reaches 0.409. It shows that only 40.9% of variable of Original Regional Income (PAD). While according to path analysis obtained result of calculation which show that indirect influence only equal to 0.39104 or about 39.104%. The conclusions of the research are as follows: (i) Parking charges have no significant effect on PAD. (ii) PAD has no significant effect on the development of facilities and infrastructure. (iii) There is no significant effect of parking levy on the development of facilities and infrastructure through PAD.

**Keywords:** Parking Charge, Local Income, Facilities and Infrastructure

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Bandung, apa saja hambatan yang dialami dalam pengelolaannya selama ini, dan proses penerimaan menjadi pendapatan asli daerah (PAD) yang bermuara / bermanfaat bagi pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dan jenis data yang digunakan adalah sekunder. Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Regresi Linear Berganda dan Analisis Jalur (Path Analysis). Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan Uji-F, Uji-t dan Uji Asumsi Klasik. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa  $R^2$  mencapai 0,409. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya 40,9% variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan menurut analisis jalur diperoleh hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung hanya sebesar 0,39104 atau sekitar 39,104%. Kesimpulan hasil penelitian adalah sebagai berikut: (i) Retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. (ii) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengembangan sarana dan prasarana. (iii) Tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari Retribusi parkir terhadap pengembangan sarana dan prasarana melalui PAD.

**Kata Kunci:** Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah, Sarana dan Prasarana

## 1. PENDAHULUAN

Sejak diterapkannya konsep otonomi daerah, pemerintah daerah semakin memperoleh peluang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi daerah agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sekarang ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka menggali pendapatan asli daerah (PAD).

Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PAD yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu membuat daerah yang kaya potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam penyediaan pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan daerah yang lebih besar.

Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, salah satu pendapatan daerah yang potensial adalah

retribusi parkir. Retribusi ini dianggap potensial karena lahan parkir di wilayah Kabupaten Bandung jumlahnya relatif banyak dengan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung sebagai objek retribusi parkir, menjadikan retribusi parkir sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial untuk dapat menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pengelolaan perparkiran di bahu jalan (*on street*) Kabupaten Bandung menjadi kewenangan unit pelaksana teknis pengelola perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Tugas pokok unit pelaksana teknis pengelola perparkiran yaitu melaksanakan pengelolaan perparkiran sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pihak unit pelaksana teknis pengelola perparkiran mengelola perparkiran serta menarik jasa retribusi parkir saja, tetapi tidak termasuk pemungutan hasil pajak parkir *off street* yang menjadi kewenangan Dinas Pelayanan Pajak Kabupaten Bandung.

Adapun kawasan perparkiran di Kabupaten Bandung pada saat ini terbagi menjadi 11 wilayah 31 Kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bandung dan rekapitulasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1. Kawasan Perpustakaan Kabupaten Bandung**

No	Wilayah Perpustakaan
1	Wilayah Soreang / Kutawaringin
2	Wilayah Ciwidey / Pasir Jambu / Rancabali
3	Wilayah Baleendah
4	Wilayah Dayeuh Kolot/ Bojong Soang
5	Wilayah Ciparay/ Pacet/ Ibum/ Kertasari
6	Wilayah Majalaya/ Paseh/ Solokan Jeruk
7	Wilayah Rancaekek/ Cileunyi/ Cilengkrang/ Cimenyan
8	Wilayah Cicalengka/ Cikancung/ Nagreg
9	Wilayah Margahayu / Katapang/ Margaasih
10	Wilayah Banjaran / Pameungpeuk/ Anjarsari/ Canguang
11	Wilayah Pangalengan/ Cimaung

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Kab. Bandung

Data pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir yang mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ditindaklanjuti dengan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Kabupaten Bandung, PERDA Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, PERDA Kabupaten Bandung No. 12 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Serta ditindaklanjuti oleh SK Bupati Nomor: 550/Kep.580-DISHUB/2015. Tanggal 14 Januari 2015 tentang Penetapan Lokasi Parkir Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Bandung, ± 224 Titik Parkir, dengan 572 Juru Parkir serta tempat Khusus Parkir.

Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung merupakan lembaga teknis daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 20 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan kemampuan sebagai perwujudan dari Otonomi Daerah.

Sebagai unsur penunjang yang membantu Bupati Bandung, Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok dalam memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan sebagian bidang Pekerjaan Umum.

Sasaran strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Salah satunya mewujudkan sistem jaringan jalan yang sesuai dengan pemanfaatan peranan dan fungsi jalan secara optimal, mewujudkan jaringan jalan dan jembatan dengan tingkat pelayanan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang terjadi dalam retribusi parkir di Kabupaten Bandung ini adalah tidak tercapainya target dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

## 2. METODOLOGI

Menurut tingkat eksplanasi atau penjelasannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal. Dengan demikian akan dicari hubungan kausal di antara beberapa variabel penelitian. Adapun untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, berikut disajikan operasionalisasi variabel dalam bentuk tabel di bawah.

**Tabel 2. Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1.	Retribusi Parkir (X)	Pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parker yang di tentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah Rupiah PAD yang diperoleh dari Retribusi Parkir periode 2008 - 2015	Rasio

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
		(Undang-undang Nomor 28 tahun 2009)		
2.	Pendapatan Asli Daerah PAD (Y)	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah Mardiasmo (2011:112)	Jumlah keseluruhan PAD Periode 2008 - 2015	Rasio
3.	Pengembangan Sarana & Prasarana (Z)	Memberikan jumlah pelayanan terbaik terhadap masyarakat pengguna jalan dengan memperbaiki jaringan jalan agar dalam kondisi baik dan sedang sehingga mendekati harapan dan kebutuhan masyarakat. Lakip (2015)	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana dengan ukuran fasilitas jalan umum Periode 2008 - 2015	Rasio

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Deskriptif

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi dan Target Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2015, Laporan Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah DPPK Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2015, LAKIP 2013 dan LAKIP 2015 Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung.

##### 3.1.1 Penerimaan Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi parkir termasuk kepada daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas retribusi parkir terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui penerimaan retribusi parkir dan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) serta kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Terlihat seperti pada tabel berikut:

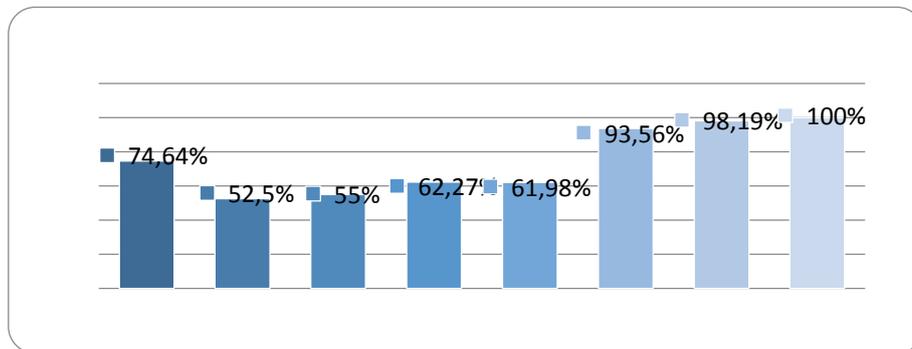
**Tabel 3. Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Bandung Tahun 2008-2015**

No	Tahun Anggaran	Target Retribusi Parkir (Rp)	Realisasi Retribusi Parkir (Rp)	%
1	2008	300.000.000	223.917.800	74,64
2	2009	450.000.000	236.253.200	52,50
3	2010	457.000.000	251.364.100	55,00
4	2011	500.000.000	311.335.000	62,27

5	2012	750.000.000	464.853.000	61,98
6	2013	825.000.000	771.839.000	93,56
7	2014	850.084.000	834.733.800	98,19
8	2015	855.024.000	855.030.000	100,00

Sumber: Unit Pelaksana Teknis Perparkiran DISHUB Kabupaten Bandung 2015

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008 realisasi retribusi parkir mencapai 74,64 persen sedangkan target retribusi sebesar Rp.300.000.000,- kekurangan dari target tersebut sebesar Rp.76.082.200,-. Pada tahun 2009 target dinaikkan tetapi realisasi semakin menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2010 adanya peningkatan mencapai 55,00 persen pada tahun 2011 mengalami kenaikan kembali mencapai 62,27 persen dan mengalami penurunan kembali realisasi parkir sebesar 61,98. Pada tahun 2013 adanya perubahan sistem kinerja realisasi mengalami kenaikan sehingga tahun 2015 mencapai target 100 persen. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan pencapaian realisasi retribusi parkir dari periode tahun 2008 - 2015.



Gambar 1. Grafik Penerimaan Retribusi Parkir Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2015

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Tabel 4. Perkembangan Penerimaan Retribusi Parkir Tahun 2008 - 2015

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Parkir (%)	Indeks Realisasi Retribusi Parkir (%)
1	2008	74,64	-
2	2009	52,50	-0.297
3	2010	55,00	0.048
4	2011	62,27	0.132
5	2012	61,98	-0.005
6	2013	93,56	0.510
7	2014	98,19	0.049
8	2015	100,00	0.018

Sumber : Data sekunder yang diolah 2016

Jumlah kontribusi retribusi parkir dari tahun 2008 sampai 2009 mengalami penurunan yang diakibatkan banyaknya kebocoran dana dari sektor retribusi perparkiran, dan jumlah retribusi tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 0,048%, pada tahun 2011 meningkat kembali sebesar 0,132%. Hal ini disebabkan

adanya penambahan volume kendaraan dan kebijakan dari pemerintah tentang penertiban perparkiran.

Pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali sebesar 0,005% hal ini disebabkan karena banyaknya parkir-parkir liar dan premanisme yang turut mengambil alih dan tidak disetorkan kepada pihak pemerintah. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,510%. Hal ini karena Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah dan kebijakan-kebijakan perparkiran dengan tegas walaupun belum maksimal berjalan, akan tetapi target dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2015 jumlah retribusi parkir mencapai realisasi 100%.

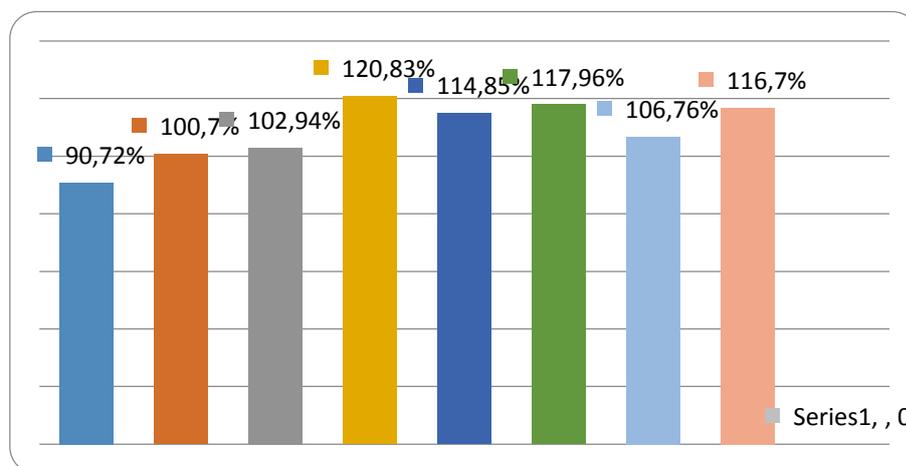
Adapun data mengenai penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung selama tahun anggaran 2008 - 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 - 2015**

No.	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%
1	2008	159.455.822.986,00	144.660.409.277,08	90,72
2	2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70
3	2010	192.971.977.423,00	198.650.518.839,00	102,94
4	2011	240.907.807.907,00	291.079.862.460,00	120,83
5	2012	318.947.610.000,00	366.316.900.578,00	114,85
6	2013	430.127.599.111,00	507.395.241.823,00	117,96
7	2014	583.782.229.947,00	623.368.072.245,00	106,76
8	2015	672.548.761.361,00	784.880.155.100,82	116,70

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2015

Penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat grafik hasil pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) periode 2008 - 2015:



**Gambar 2. Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada DPPK Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 - 2015**

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Tabel 6. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 - 2015

No	Tahun Anggaran	Realisasi PAD (%)	Indeks Realisasi PAD (%)
1	2008	90,72	-
2	2009	100,70	0.110
3	2010	102,94	0.022
4	2011	120,83	0.174
5	2012	114,85	-0.049
6	2013	117,96	0.027
7	2014	106,76	-0.095
8	2015	116,70	0.093

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan adanya penambahan kontribusi dari hasil retribusi daerah, pajak daerah, perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah dan dari hasil pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

### 3.1.2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Jalan Umum

Tabel 7. Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung Tahun 2008 - 2015

No	Indikator Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Peningkatan Jalan	75.55	86.80	94.43	95.00	91.67	92.00	109.57	112.45
2	Pemeliharaan Jalan	59.00	84.00	75.00	88.86	89.00	81.71	94.16	99.78
3	Pemeliharaan Jembatan	150.00	140.98	143.00	157.00	140.98	48.00	42.00	127.00
4	Pembangunan Kirmir Jalan	100.34	100.78	102.12	111.09	120.00	100.00	00.00	100.00
5	Pembangunan Drainase Jalan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Pedestrian	134.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.00	92.00	96.10
7	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	109.00	100.00	97.00	100.00	100.00	112.00	134.00	144.00
8	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		103.49	101.57	101.44	106.49	105.21	103.84	108.97	109.92

Sumber : Data sekunder yang diolah

Berdasarkan dari tabel 4.5 diatas pencapaian jalan mentap telah melebihi target dari periode tahun 2008-2015, ada beberapa faktor pendorong yang menjadi faktor pendukung pencapaian antara lain adalah kebijakan kepala daerah dalam hal ini Bupati Bandung yang mendukung secara penuh peningkatan kualitas infrastruktur jalan dengan memberikan tambahan anggaran untuk peningkatan jalan, untuk pencapaian dalam hal program pembangunan infrastruktur lainnya seperti

pembangunan tembok penahan tanah (TPT), pembangunan draenase, pemeliharaan jembatan, pembangunan trotoar, pembangunan lampu penerangan jalan umum (PJU)

**Tabel 8. Perkembangan Sarana dan Prasarana Tahun 2008 -2015**

No	Tahun Anggaran	Realisasi PAD (%)	Indeks Realisasi PAD (%)
1	2008	107.24	-
2	2009	106.07	-0.011
3	2010	101.44	-0.044
4	2011	106.49	0.050
5	2012	105.21	-0.012
6	2013	103.84	-0.013
7	2014	108.97	0.049
8	2015	109.92	0.009

Sumber : Data sekunder yang diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja sasarannya melebihi 100%, hal ini termasuk dalam kriteria BAIK, bahkan mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2015 tingkat kemantapan fasilitas sarana dan prasarana mengalami kenaikan indeks mencapai 0,009%, artinya target menangani fasilitas sarana dan prasarana telah tercapai dengan persentase sebesar 109,92%

**Tabel 9. Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 - 2015**

No	Tahun Anggaran	Penerimaan Retribusi Parkir (Rp)	Penerimaan PAD (Rp)	%
1	2008	223.917.800	144.660.409.277	0,155
2	2009	236.253.200	152.549.655.824	0,155
3	2010	251.364.100	198.650.518.839	0,127
4	2011	311.335.000	291.079.862.460	0,107
5	2012	464.853.000	366.316.900.578	0,127
6	2013	771.839.000	507.395.241.823	0,152
7	2014	834.733.800	623.368.072.245	0,134
8	2015	855.030.000	784.880.155.388	0,109

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2015

Setiap kontribusi retribusi parkir dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung yang menunjukkan bahwa retribusi daerah salah satunya retribusi parkir mempunyai peranan yang cukup besar terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Setelah digambarkan 3 (tiga) variabel penelitian di atas, maka selanjutnya dilakukan pengujian deskriptif untuk setiap variabel. Tujuan dari pengujian deskriptif ini adalah untuk melihat nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian dalam 8 (delapan) tahun pengamatan. Berikut disajikan statistik deskriptif data Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pengembangan Sarana dan Prasarana.

**Tabel 10. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	8	91	121	108.93	10.409
Y	8	107	155	133.25	19.470
Z	8	10,144	10,992	10,511.63	316.651
Valid N	8				

Sumber: Data sekunder yang diolah

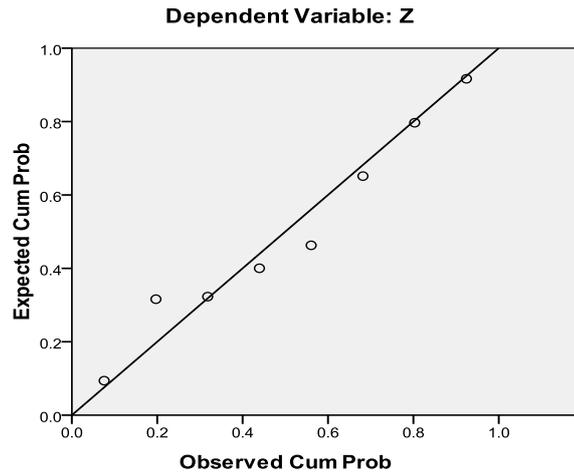
Dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel di atas dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- a. Retribusi Parkir
  - 1) Skor rata-rata Retribusi Parkir adalah sebesar 108.93.
  - 2) Skor maksimum atau batas atas dari Retribusi Parkir adalah sebesar 121.
  - 3) Skor minimum atau batas bawah dari Retribusi Parkir adalah sebesar 91.
  - 4) Standar deviasi atau batas penyimpangan dari variabel Retribusi Parkir adalah sebesar 10.409.
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 1) Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 133.25
  - 2) Nilai maksimum atau batas atas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 155.
  - 3) Nilai minimum atau batas bawah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 107.
  - 4) Standar deviasi atau batas penyimpangan dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 19.470.
- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana
  - 1) Nilai rata-rata variabel Pengembangan Sarana dan Prasarana adalah sebesar 10,511.6.
  - 2) Nilai maksimum atau batas atas dari variabel Pengembangan Sarana dan Prasarana adalah sebesar 10,992
  - 3) Nilai minimum atau batas bawah dari variabel Pengembangan Sarana dan Prasarana adalah sebesar 10,144.
  - 4) Standar deviasi atau batas penyimpangan dari variabel Pengembangan Sarana dan Prasarana adalah sebesar 316.651.

### 3.2 Uji Asumsi Klasik

#### 3.2.1 Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang baik. Metode uji normalitas dalam penelitian ini di bantu dengan program SPSS V 17 yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik.



Gambar 3. Grafik Normal P-P Plot

Sumber: Data Sekunder. Data diolah 2016

Dari gambar grafik diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Menurut Ghozali (2006) bahwa:

“Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi normalitas.”

### 3.2.2 Uji Multikolinieritas

Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation faktor* (VIF) dengan kriteria :

Jika nilai VIF > 10 terdapat gejala multikoloniearitas.

Jika nilai VIF < 10 tidak terdapat gejala multikoloniearitas.

Tabel 11. Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.975.245	2.262.892		4.850	.005		
X	5.570	13.790	.183	.404	.703	.591	1.693
Y	-8.033	7.373	-.494	-1.090	.326	.591	1.693

a. Dependent Variable: Z

Sumber : Data Sekunder yang diolah

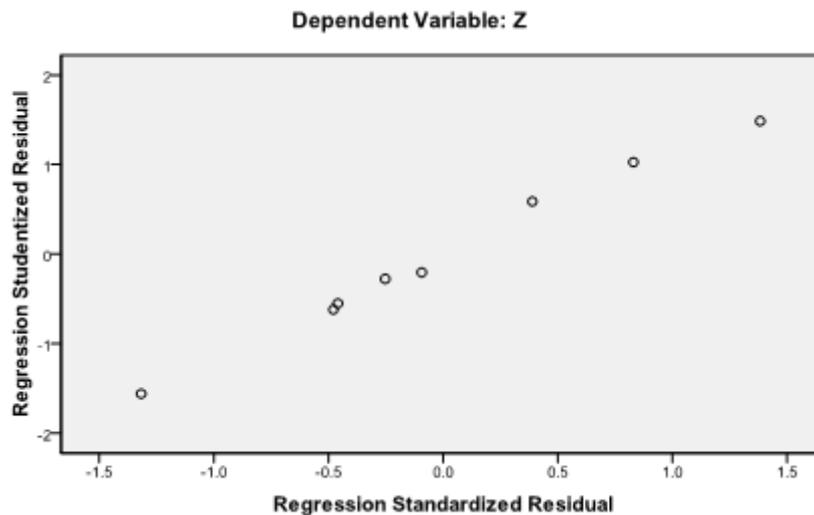
Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* kedua variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model regresi.

### 3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZRESID dan nilai residualnya SRESID.

Dasar pengambilan keputusan uji tersebut yaitu sebagai berikut :

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar lalu menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar 4. Grafik Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Sekunder data diolah 2016

Dari *output* diatas dapat diketahui bahwa titik-titik berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi.

## 3.2 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen (Retribusi Parkir /X), terhadap variabel dependen (Pengembangan Sarana dan Prasarana/Z) melalui variabel intervening (Pendapatan Asli Daerah PAD) /Y).

### 3.2.1 Pengujian Hubungan Antar Sub Variabel

Sebelum mencari hubungan variabel-variabel penelitian, harus menghitung matriks korelasi dari variabel Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah PAD, dan Pengembangan Sarana dan Prasarana. Perhitungan koefisien korelasi dalam penelitian ini menggunakan SPSS V 17.

Tabel 12. Koefisien Korelasi  
Correlations

		Z	X	Y
Pearson Correlation	Z	1.000	.499	-.611
	X	.499	1.000	-.640
	Y	-.611	-.640	1.000
Sig. (1-tailed)	Z	.	.104	.054
	X	.104	.	.044
	Y	.054	.044	.
N	Z	8	8	8
	X	8	8	8
	Y	8	8	8

Sumber : Data Sekunder data diolah

Tabel di atas dapat berfungsi pula sebagai matriks korelasi. Selanjutnya perlu dicari koefisien jalur yang secara manual dapat dicari berdasarkan matriks korelasi di atas dengan mengalikan matriks invers korelasi variabel independen dan variabel dependen melalui variabel intervening. Namun, kali ini perhitungan dibantu dengan menggunakan program SPSS dan hasilnya seperti yang terlihat pada tabel 4.11 dalam tabel tersebut dapat diperoleh koefisien jalur atau koefisien beta variabel X Y dan Z.

Tabel 13. Standardized Coefficients

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.975.245	2.262.892		4.850	.005		
X	5.570	13.790	.183	.404	.703	.591	1.693
Y	-8.033	7.373	-.494	-1.090	.326	.591	1.693

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Setelah itu dilanjutkan mencari pengaruh tidak langsung Retribusi parkir terhadap Pengembangan sarana dan prasarana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Angka korelasi tersebut dimasukkan dalam rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 X \rightarrow Y \rightarrow Z &= \rho_{yx} \times r_{xy} \times \rho_{yz} \\
 &= (0.183) \times (-0,640) \times (-0.494) \\
 &= 0.05786 \text{ atau } 5.78 \%
 \end{aligned}$$

### 3.2.2 Persamaan Analisis Jalur Model I ( $Y = \beta_{yx} + \epsilon_1$ )

Penentuan pengaruh variabel penelitian secara keseluruhan diperoleh nilai koefisien jalur dari penjumlahan seluruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Nilai koefisien jalur variabel Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diolah dengan menggunakan program SPSS 17.

**Tabel 14. Koefisien Analisis Jalur Model I**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	263.617	64.178		4.108	.006
X	-1.197	.587	-.640	-2.039	.088

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder. Data diolah 2016

Berdasarkan data pada tabel 4.11 koefisien jalur yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah  $\beta_x = -1.197$

Jadi persamaan analisis jalur yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_{yx} + \varepsilon_1$$

$$Y = 0 - 1.197 + \varepsilon_1$$

Untuk mendapatkan nilai residu dengan 1-R square, maka koefisien residu =  $1 - 0.409 = 0,591$ . Sehingga persamaan jalurnya menjadi :

$$Y = -1.197 \text{ Retribusi Parkir} + 0,591$$

### 3.13 Persamaan Analisis Jalur Model II ( $Z = \beta_{yx} + \beta_{zy} + \varepsilon_2$ )

Penentuan pengaruh variabel penelitian secara keseluruhan diperoleh nilai koefisien jalur dari penjumlahan seluruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai koefisien jalur variabel Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah dan Pengembangan Sarana dan Prasarana diolah dengan menggunakan program SPSS 17.

**Tabel 15. Koefisien Analisis Jalur Model II**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.975.245	2.262.892		4.850	.005
1 X	5.570	13.790	.183	.404	.703
Y	-8.033	7.373	-.494	-1.090	.326

a. Dependent Variable: Z

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.12 koefisien jalur yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah  $\beta_x = 5.570$ ,  $\beta_y = -8.033$

Jadi persamaan analisis jalur untuk model II yang terbentuk adalah:

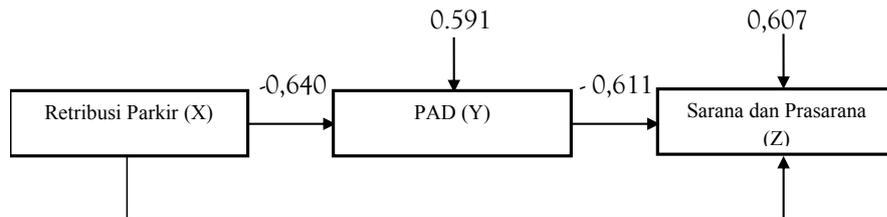
$$Z = \beta_{yx} + \beta_{zy} + \varepsilon_2$$

$$Z = 5.570 - 8.033 + 0.607$$

Untuk mendapatkan nilai residu dengan 1-R square, maka koefisien residu =  $1 - 0.393 = 0,607$ . Sehingga persamaan jalurnya menjadi:

$$Z = 5.570 \text{ Retribusi Parkir} - 8.033 \text{ Pendapatan Asli Daerah} + 0,607$$

Nilai koefisien jalur dari hasil *output* aplikasi program SPSS 17 untuk keseluruhan variabel dapat digambarkan dalam diagram analisis jalur:



Gambar 5. Analisis Jalur Model I dan Model II

Sumber: Data Sekunder yang diolah

### 3.3.1 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh langsung dan tidak langsung untuk analisis jalur variabel Retribusi Parkir terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari penjelasan sebelumnya diketahui bahwa pengaruh langsung (X) terhadap (Y) sebesar -0.640 atau -64 % dan pengaruh (Y) terhadap (Z) sebesar -0.611 atau -61.1 %. Maka pengaruh tidak langsung yaitu sebesar  $(-0.640) \times (-0,611) = 0.39104$  atau 39.104 %.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu Retribusi Parkir dan variabel intervening yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara simultan maupun parsial mempengaruhi variabel dependen yaitu Pengembangan Sarana dan Prasarana.

#### 3.3.1 Uji t (Parsial)

Tabel 16. Hasil Uji Parsial Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	263.617	64.178		4.108	.006
X	-1.197	.587	-.640	-2.039	.088

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Retribusi Parkir adalah sebesar 0.088. Nilai ini lebih besar dari tingkat

signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu hasil penelitian ini menerima  $H_0$  dan menolak hipotesis yang diajukan peneliti yaitu:

- $H_1 : \rho \neq 0$ , berarti retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

**Tabel 17. Hasil Uji Parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.835.852	706.861		16.744	.000
Y	-9.938	5.256	-.611	-1.891	.108

a. Dependent Variable: Z

Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari hasil pengolahan data pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel Retribusi Parkir adalah sebesar 0.108. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana. Untuk itu hasil penelitian ini menerima  $H_0$  dan menolak hipotesis yang diajukan peneliti yaitu:

$H_1 : \rho \neq 0$ , berarti pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengembangan sarana dan prasarana Kabupaten Bandung.

### 3.3.1 Uji F

**Tabel 18. Nilai Signifikan Secara Simultan**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	275961.619	2	137980.810	1.620	.287 <sup>a</sup>
	Residual	425914.256	5	85182.851		
	Total	701875.875	7			

b. Dependent Variable: Z

Sumber: Data sekunder yang diolah

Berdasarkan nilai signifikan pada tabel di atas diperoleh nilai probabilitas F sebesar 1.620 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,287 menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana. Untuk itu hasil penelitian ini menerima  $H_0$  dan menolak hipotesis yang diajukan peneliti yaitu:

- $H_1 : \rho \neq 0$ , berarti Retribusi parkir berpengaruh terhadap pengembangan sarana dan prasarana Kabupaten Bandung melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)

### 3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 19. Koefisien Determinasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 <sup>a</sup>	.409	.311	16.161

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pada tabel 4.17 model summary didapat satu model analisis jalur dengan koefisien korelasi ( $R$ ) = 0,640. Nilai koefisien determinasi ( $R$  square) = 0,409 atau 40,9 % Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan 59,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model dalam penelitian ini.

Tabel 20. Koefisien Determinasi Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.627 <sup>a</sup>	.393	.150	291.861

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pada tabel 4.17 model summary didapat satu model analisis jalur dengan koefisien korelasi ( $R$ ) = 0,627. Nilai koefisien determinasi ( $R$  square) = 0,393 atau 39.3%, ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi Parkir memiliki pengaruh terhadap variabel Pengembangan Sarana dan Prasarana melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 39.3 %. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 60.7 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung, dan Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung, dengan tujuan untuk mengetahui variabel Realisasi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dan dampaknya terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung. Berdasarkan analisis pada BAB IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, variabel penerimaan retribusi parkir memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2.039 Dengan nilai signifikansi 0.088 Dimana nilai sig di atas 0.05, sehingga variabel penerimaan retribusi parkir tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari pengujian yang dilakukan dihasilkan nilai R Square sebesar 0.409 atau 40.9% pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh penerimaan retribusi parkir, sedangkan sisanya 59.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dan tidak dimasukkan kedalam model ini.

- b. Hasil analisis jalur dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi parkir berpengaruh langsung terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -64%, artinya tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara Retribusi Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian analisis ini tidak mendukung teori yang berkembang mengenai adanya pengaruh Retribusi Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung sebesar -61.1% , artinya tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung. Hasil ini tidak mendukung teori yang berkembang dan logika yang digunakan peneliti mengenai adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kabupaten Bandung
- d. Pengaruh retribusi parkir terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung sebesar 0.499 atau 49.9%, berarti dampak retribusi parkir terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung kurang begitu berpengaruh.
- e. Retribusi parkir berpengaruh tidak langsung terhadap pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung melalui Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.39104 atau 39.104%.. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh retribusi parkir dampaknya kurang berpengaruh dalam pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis , diantaranya :

- a. Walaupun hasil penelitian tidak menunjukkan hasil yang signifikan ada baiknya kontribusi Retribusi Parkir tetap dilakukan sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan atau menggunakan variabel lain seperti : Retribusi Daerah atau Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggap lebih mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dalam meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di Kabupaten Bandung.
- c. Menjalin komunikasi yang lebih baik antara pimpinan dan para pegawai sampai tenaga lapangan. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif yang dapat memacu dan meningkatkan kinerja para pegawai.

- d. Pemantauan atau pengawasan langsung sebaiknya dilakukan secara rutin dan berkala. Ini dilakukan agar hasil dan pelaksanaan kerja para pegawai dapat diukur secara baik. Apakah sesuai dengan rencana dan tata laksana yang ada atau tidak. Dengan adanya pemantauan langsung secara rutin dan berkala diharapkan masalah-masalah dan kesalahan-kesalahan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan perpajakan dapat segera diketahui dan teridentifikasi.
- e. Evaluasi dilakukan secara lebih rutin dan mendetail. Dengan evaluasi yang baik dan rutin diharapkan dapat mempersiapkan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan perpajakan. Karena dengan evaluasi dapat memacu motivasi dan dedikasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya menuju arah yang lebih baik. Kegiatan evaluasi diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik untuk pelaksanaan kerja yang akan datang dapat member kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan parkir dan penerimaan retribusi di Kabupaten Bandung.
- f. Perlunya penegakan peraturan dan pemberian sanksi yang tegas sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan terhadap pegawai. Pemberian sanksi harus lebih tegas dan tepat sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan agar pegawai bekerja menjadi lebih baik.
- g. Pembinaan pegawai secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan beragam aturan dan prosedur organisasi. Pegawai dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan UPTD. Dengan pembinaan pegawai yang terpadu dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kinerja para pegawai dan meminimalisasi kesalahan yang dibuat pegawai.
- h. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, di sarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mencoba menggunakan metode analisis lainnya, bandingkan mana yang lebih tepat antara kedua metode ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014*. Jakarta: BPN RI, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, Ph.D dan Dadang Solihin, M.A. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Cet.4*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam. 2006. *Generalized Structured Component Analysis (GSCA) Model Persamaan Struktural Berbasis Komponen*, Cetakan Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisa & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta : UPI Press.

- Kesit, Bambang Prakosa. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mardiasmo, 2011. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
- Santoso, Singgih. 2010. *Statistik Multivariat*, Jakarta: PT. Gramedia
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung:Alfabeta.
- Surat Keputusan Bupati Kab. Bandung Nomor:550/Kep.293-DISHUB/2012
- Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 5 tahun 2008
- STIE INABA. 2015. *Pedoman Penyusunan & Penulisan Skripsi*. Bandung: STIE INABA.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Wahid Sulaiman, 2004, *Analisis-Analisis Regresi menggunakan SPSS*, Yogyakarta: ANDI.
- Wijaya, P.R.L., Bandi., dan A. Wibawa. 2010. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- [www.definisi-pengertian.com](http://www.definisi-pengertian.com)
- [www.lakip2013 .go.id](http://www.lakip2013.go.id)